

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis rasio keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata selama periode tahun 2019-2022, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDF):

RDF pada tahun 2019-2022 berkisar antara 4,84% hingga 5,67%. Kategori "Sangat Kurang" menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih dianggap tidak memadai. Terjadi penurunan PAD dari tahun 2019 hingga 2021, namun mengalami peningkatan pada tahun 2022. Meskipun demikian, RDF masih tergolong rendah.

b. Rasio Ketergantungan Daerah:

Tingkat ketergantungan keuangan daerah pada Kabupaten Lembata tergolong tinggi, dengan rasio ketergantungan mencapai antara 90,64% hingga 93,01% pada tahun 2019-2022. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer menunjukkan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk mengurangi risiko ketergantungan yang berlebihan.

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD):

RKKD pada tahun 2019-2022 tergolong sangat rendah, berkisar antara 5,21% hingga 6,14%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri masih sangat

terbatas. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pendapatan lokal, menggali potensi baru, dan mengembangkan sumber pendapatan alternatif.

d. Rasio Efektivitas:

Rasio efektivitas pada tahun 2019-2022 menunjukkan kinerja yang tidak efektif, dengan persentase efektivitas berkisar antara 60% hingga 95%. Meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2022, perlu perhatian lebih lanjut terkait efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

e. Rasio Efisiensi:

Rasio efisiensi menunjukkan perbandingan biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan daerah. Terdapat fluktuasi dalam efisiensi, dengan kategori efisiensi yang cukup efisien pada tahun 2019-2020, namun menjadi tidak efisien pada tahun 2021-2022. Perlu evaluasi terhadap pengeluaran dan pendapatan daerah.

f. Rasio Keserasian Belanja:

Prioritas belanja lebih condong ke belanja operasional daripada belanja modal. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan lebih fokus pada pengelolaan sumber daya manusia daripada pembangunan infrastruktur atau proyek strategis.

g. Rasio Pertumbuhan:

Terjadi penurunan pertumbuhan pada PAD, pendapatan, dan belanja operasional, sementara belanja modal mengalami pertumbuhan signifikan di tahun 2022. Perlu perhatian khusus terhadap penurunan pertumbuhan PAD.

h. Rasio Pajak Daerah terhadap PAD:

Rasio pajak daerah terhadap PAD mengalami peningkatan dari 18% pada tahun 2019 menjadi 30% pada tahun 2022. Meskipun demikian, kriteria masih tergolong "Kurang". Diperlukan upaya untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah.

6.2 Saran

Berdasarkan analisis rasio keuangan dan hasil evaluasi, berikut adalah beberapa saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata:

1. Diversifikasi Sumber Pendapatan:

Mendorong diversifikasi sumber pendapatan, termasuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi lokal, mengembangkan sektor ekonomi yang berpotensi, dan meningkatkan kontribusi sektor pajak daerah.

2. Peningkatan Kemandirian Keuangan:

Mengembangkan strategi untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, seperti menggali potensi sumber daya lokal, mengembangkan sektor ekonomi yang berkesinambungan, dan mendukung inisiatif usaha lokal.

3. Optimalisasi Pengeluaran:

Melakukan evaluasi terperinci terhadap pengeluaran daerah untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Fokuskan pada peningkatan efisiensi belanja operasional dan alokasi anggaran yang lebih baik.

4. Peningkatan Kualitas Belanja:

Memastikan bahwa belanja daerah lebih seimbang antara belanja operasional dan belanja modal. Prioritaskan proyek-proyek strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

5. Peningkatan Efisiensi Pendapatan:

Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan dan penagihan pajak daerah serta mengoptimalkan potensi penerimaan lainnya. Lakukan pembaruan pada kebijakan dan prosedur pajak.